

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 1, April 2024

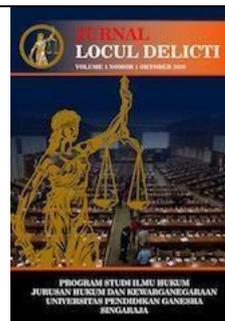
p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



TKI ILEGAL KE KAMBOJA: SANKSI HUKUM, MODUS PENIPUAN, DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN NEGARA

Hezkiel Munte ¹

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hezkiel@student.undiksha.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 8 Januari 2024 Diterima: 11 Maret 2024 Terbit: 1 April 2024</p> <p>Keywords: <i>Illegal migrant workers, Cambodia, legal sanctions, fraud schemes, state protection, human trafficking, online gambling,</i></p>	<p><i>The phenomenon of illegal Indonesian migrant workers (TKI) traveling to Cambodia has seen a significant increase, particularly in illegal sectors such as online gambling and online fraud activities (scamming). Common fraud schemes include job offers with high salaries through social media and unofficial agents, which then force victims to work under inhumane conditions and expose them to violence and exploitation. The Indonesian government faces major challenges in protecting these illegal TKI due to the absence of official labor</i></p>

scamming, Indonesian Migrant Workers.

placement agreements with Cambodia and neighboring countries, as well as the difficulty in detecting departures because of transit routes through other countries. Legal sanctions against perpetrators of illegal recruitment and human trafficking have been enforced with imprisonment threats of up to 10-15 years. Preventive efforts include banning departures and passport cancellations for those suspected, as well as strengthening immigration cooperation with Cambodia. However, state protection for illegal TKI still faces significant obstacles, especially in law enforcement and victim repatriation. This study examines the applicable legal sanctions, fraud schemes used, and the challenges of state protection for illegal TKI to Cambodia as an effort to reduce risks and exploitation of Indonesian migrant workers.

Kata kunci:

Abstrak

TKI ilegal, Kamboja, sanksi hukum, modus penipuan, perlindungan negara, perdagangan orang, judi online, scamming, pekerja migran Indonesia.

Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk bekerja di sektor ilegal seperti judi online dan aktivitas penipuan daring (scamming). Modus penipuan yang umum digunakan meliputi tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi melalui media sosial dan agen tidak resmi, yang kemudian memaksa korban bekerja dalam kondisi tidak manusiawi serta rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi TKI ilegal ini karena tidak adanya perjanjian resmi penempatan tenaga kerja dengan Kamboja dan negara-negara tetangga, serta sulitnya mendeteksi keberangkatan akibat jalur transit melalui negara lain. Sanksi hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan orang telah diterapkan dengan ancaman pidana hingga 10-15 tahun penjara. Upaya pencegahan meliputi pelarangan keberangkatan dan pembatalan paspor bagi yang terindikasi, serta penguatan kerja sama keimigrasian dengan Kamboja. Namun, perlindungan negara terhadap TKI ilegal masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemulangan korban. Studi ini mengkaji sanksi hukum yang berlaku, modus penipuan yang digunakan, serta tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja sebagai upaya mengurangi risiko dan eksploitasi

	terhadap pekerja migran Indonesia.
Corresponding Author: Hezkiel Munte E-mail: hezkiel@student.undiksha.ac.id	

@Copyright 2024

Pendahuluan

Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan perlindungan, kasus-kasus TKI ilegal yang terjebak dalam eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja masih terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi perlindungan negara terhadap warganya yang bekerja secara ilegal di luar negeri, khususnya di negara-negara yang belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia dalam hal penempatan tenaga kerja, seperti Kamboja. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai sanksi hukum yang diterapkan terhadap TKI ilegal, modus penipuan yang digunakan oleh sindikat perekrutan ilegal, serta tantangan perlindungan negara dalam menghadapi fenomena ini.

Kamboja menjadi salah satu tujuan yang semakin populer bagi TKI ilegal, terutama untuk bekerja di sektor-sektor yang dianggap ilegal oleh pemerintah Indonesia, seperti judi online dan aktivitas penipuan daring (scamming). Berdasarkan laporan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, terdapat kasus calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal yang berulang kali mencoba berangkat ke Kamboja meskipun sudah pernah dideportasi. Salah satu kasus yang menonjol adalah seorang CPMI ilegal bernama SG yang baru saja dideportasi dari Kamboja, tetapi kembali berusaha berangkat ke negara tersebut dengan menggunakan paspor baru yang diduga difasilitasi oleh oknum yang masih dalam penyelidikan. Hal ini menunjukkan adanya jaringan yang

membantu proses pembuatan dokumen ilegal, penampungan, dan pemberangkatan melalui jalur-jalur tertentu seperti pelabuhan Batam Center.

Modus penipuan yang dilakukan oleh para perekrut ilegal sangat beragam dan semakin canggih. Berdasarkan pengakuan para korban, tawaran pekerjaan yang mereka terima biasanya dikemas dengan iming-iming gaji besar dan kondisi kerja yang menjanjikan.

Salah satu contoh nyata adalah kasus sebelas WNI yang dipaksa menjadi scammer di Kamboja setelah menerima tawaran pekerjaan melalui aplikasi perpesanan Telegram. Para korban direkrut oleh agen yang tidak memiliki kantor resmi dan tidak pernah meminta mereka datang langsung ke agen penyalur. Tawaran pekerjaan sebagai pegawai call center dengan gaji mencapai Rp 12 juta per bulan menjadi daya tarik utama, namun kenyataannya mereka dipaksa melakukan aktivitas ilegal yang sangat merugikan.

Salah satu kendala utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena ini adalah sulitnya mendeteksi dan mengawasi keberangkatan TKI ilegal ke Kamboja. Tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Kamboja membuat para calon PMI biasanya transit terlebih dahulu di negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, atau Malaysia. Kondisi ini menyebabkan pihak imigrasi kesulitan mengidentifikasi tujuan akhir perjalanan mereka, sehingga upaya pencegahan menjadi kurang efektif. Selain itu, sektor yang mereka masuki di Kamboja sering kali merupakan industri ilegal, seperti operator judi online, yang semakin memperumit perlindungan dan penegakan hukum terhadap para pekerja migran tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melarang keberangkatan WNI ke Kamboja dan negara-negara lain yang rawan menjadi tempat eksploitasi tenaga kerja ilegal, serta membatalkan paspor bagi mereka yang terindikasi akan melakukan kegiatan ilegal di luar negeri. Selain itu, Indonesia juga sedang memperkuat kerja sama keimigrasian dengan Kamboja, termasuk rencana penempatan atase imigrasi di negara tersebut, sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan perlindungan

terhadap WNI yang bekerja di sektor ilegal.

Upaya pemulangan TKI ilegal dari Kamboja juga menjadi fokus penting pemerintah. Pada tahun 2022, Kementerian Luar Negeri Indonesia berhasil memulangkan 241 calon TKI ilegal dari Kamboja berkat kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenlu, Kemenaker, BP2MI, dan kepolisian. Proses pemulangan ini tidak hanya melibatkan aspek diplomasi, tetapi juga penegakan hukum terhadap para perekrut ilegal yang memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Penangkapan terhadap perekrut ilegal yang memfasilitasi keberangkatan TKI ilegal ke Kamboja menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih tegas.

Namun, masih banyak kasus tragis yang menimpa TKI ilegal di Kamboja. Salah satu contohnya adalah kematian seorang pekerja migran asal Bekasi yang diduga menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya. Korban bahkan sempat berkomunikasi dengan keluarga melalui video call untuk menceritakan kondisi penyiksaan yang dialaminya. Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam dan menyoroti betapa rentannya posisi TKI ilegal yang bekerja di sektor-sektor yang tidak diatur secara resmi di luar negeri.

Penegakan hukum terhadap perekrut dan pelaku perdagangan orang juga terus dilakukan. Misalnya, pada tahun 2024, polisi menggagalkan keberangkatan 14 calon PMI ilegal yang hendak bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Pelaku perekrutan yang berperan sebagai perantara dalam proses keberangkatan dan pengurusan dokumen ilegal berhasil diamankan dan dijerat dengan pasal perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Kasus ini menunjukkan bahwa modus operandi perekrutan ilegal melibatkan pembuatan paspor palsu, pengurusan dokumen secara ilegal, serta pengaturan jalur keberangkatan melalui beberapa kota transit seperti Medan dan Batam.

Modus penipuan yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang juga semakin beragam dan mengelabui korban dengan janji-janji pekerjaan yang menarik, seperti bekerja di perusahaan, restoran, atau sebagai petugas layanan pelanggan. Namun, pada kenyataannya, para korban sering kali dipaksa bekerja di sektor ilegal seperti judi online atau menjadi admin permainan daring yang

melibatkan tindak pidana perjudian. Tawaran pekerjaan ini biasanya disebarakan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, memanfaatkan ketidaktahuan dan kebutuhan ekonomi para calon pekerja migran.

Dalam konteks ini, tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja sangat kompleks. Selain harus menghadapi jaringan perekrutan ilegal yang terorganisir, pemerintah juga harus mengatasi keterbatasan regulasi dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan. Belum adanya perjanjian resmi antara Indonesia dan Kamboja dalam hal penempatan tenaga kerja membuat perlindungan hukum bagi TKI ilegal menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan sulitnya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi yang dialami oleh para pekerja migran tersebut.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek hukum yang mengatur sanksi terhadap TKI ilegal, mengungkap modus penipuan yang digunakan oleh sindikat perekrutan, serta menganalisis tantangan perlindungan negara dalam menghadapi fenomena TKI ilegal ke Kamboja. Dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran Indonesia serta mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan bangsa dan negara.

Fenomena TKI ilegal ke Kamboja tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan perlindungan, tetapi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak keluarga di Indonesia yang terdampak secara langsung akibat anggota keluarganya menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi dan edukasi mengenai risiko bekerja secara ilegal di luar negeri. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang prosedur resmi penempatan tenaga kerja migran turut menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh sindikat perekrutan ilegal untuk merekrut calon pekerja. Selain itu, faktor ekonomi yang memaksa sebagian masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan cara instan dan tanpa prosedur resmi semakin memperparah masalah ini.

Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup ketat untuk mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran, seperti Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus TKI ilegal yang bekerja di negara-negara tanpa perjanjian bilateral resmi. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum dan akses bantuan bagi para korban. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sanksi hukum dapat diterapkan secara efektif dan bagaimana upaya perlindungan negara dapat diperkuat untuk mengatasi tantangan yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif untuk menganalisis aspek hukum dan perlindungan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Kamboja. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan kebijakan hukum yang mengatur sanksi terhadap TKI ilegal serta upaya perlindungan negara, sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan modus penipuan yang digunakan oleh sindikat perekrutan ilegal serta tantangan perlindungan negara dalam konteks praktik migrasi ilegal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peraturan terkait perdagangan orang, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, artikel jurnal, berita media massa, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pekerja migran non prosedural di Kamboja dan kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan TKI ilegal.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik studi dokumen dan literatur, yang menafsirkan norma-norma hukum dan fakta empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini juga menelaah kebijakan pemerintah Indonesia dan kerja sama bilateral dengan Kamboja dalam upaya perlindungan dan penanganan TKI ilegal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai sanksi hukum, modus

penipuan, dan tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja.

Pembahasan

Gambaran Umum Fenomena TKI Ilegal ke Kamboja

Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja menunjukkan peningkatan signifikan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terlibat dalam sektor-sektor rentan, seperti judi online dan penipuan daring (scamming). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus PMI ilegal yang ditangani meningkat hingga 60 kali lipat sejak tahun 2020 hingga 2024, dengan jumlah sekitar 80.000 WNI bekerja secara ilegal di Kamboja.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) secara tegas melarang keberangkatan WNI ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar karena tingginya risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi yang dialami para pekerja migran di negara-negara tersebut. Larangan ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama bilateral resmi dalam penempatan tenaga kerja ke negara-negara tersebut, sehingga status PMI di sana dianggap ilegal dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Modus Penipuan dan Perekrutan Ilegal

Modus penipuan yang digunakan oleh sindikat perekrutan ilegal sangat beragam dan semakin canggih. Para calon PMI sering kali ditawari pekerjaan dengan gaji tinggi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti Telegram. Tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji hingga Rp 12 juta per bulan sebagai pegawai call center atau admin judi online menjadi daya tarik utama. Namun, kenyataannya, para korban dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, bahkan terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penipuan daring dan perjudian online.

Sindikat perekrutan ilegal juga memanfaatkan jalur transit melalui negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia untuk mengelabui aparat imigrasi Indonesia. Para calon PMI menggunakan visa wisata untuk memasuki

negara-negara tersebut sebelum akhirnya menuju Kamboja, sehingga sulit bagi aparat untuk mengawasi dan mencegah keberangkatan ilegal ini. Pelabuhan Internasional Batam Center menjadi salah satu jalur favorit untuk pengiriman PMI ilegal ke Kamboja, terutama dari daerah-daerah seperti Aceh, NTB, dan Lampung. Selain itu, jaringan perekrutan ilegal juga memfasilitasi pembuatan dokumen palsu, termasuk paspor dan visa, untuk memperlancar keberangkatan PMI ilegal. Kasus seorang CPMI ilegal bernama SG yang telah dideportasi dari Kamboja namun kembali mencoba berangkat dengan paspor baru yang diduga difasilitasi oleh oknum tertentu menunjukkan betapa kuatnya jaringan ini.

Sanksi Hukum terhadap TKI Ilegal dan Perekrut

Pemerintah Indonesia telah menegakkan berbagai sanksi hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan orang yang memfasilitasi keberangkatan TKI ilegal ke Kamboja. Pelaku perekrutan yang berhasil diamankan dijerat dengan pasal perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindak tegas pelaku sindikat yang merugikan pekerja migran dan negara.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatalan paspor dan pelarangan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi akan melakukan perjalanan ilegal ke Kamboja dan negara-negara rawan TPPO lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah PMI ilegal yang berangkat ke luar negeri tanpa prosedur resmi.

Namun, meskipun ada sanksi hukum yang tegas, masih banyak TKI ilegal yang nekat berangkat ke Kamboja. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai risiko dan prosedur resmi, serta daya tarik gaji tinggi yang ditawarkan oleh sindikat ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

Tantangan Perlindungan Negara terhadap TKI Ilegal

Perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja menghadapi tantangan

yang sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya perjanjian kerja sama bilateral resmi antara Indonesia dan Kamboja mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran. Hal ini menyebabkan status hukum TKI ilegal menjadi sangat rentan dan sulit mendapatkan perlindungan hukum maupun bantuan dari pemerintah Indonesia saat mengalami masalah di luar negeri.

Selain itu, sektor pekerjaan yang dimasuki oleh TKI ilegal di Kamboja umumnya merupakan sektor ilegal seperti judi online dan penipuan daring, sehingga pemerintah Kamboja pun sulit memberikan perlindungan dan pengakuan resmi terhadap mereka. Kondisi ini memperparah kerentanan TKI ilegal terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya pemulangan TKI ilegal yang menjadi korban TPPO juga menjadi fokus penting pemerintah. Pada tahun 2024 hingga April 2025, Kementerian P2MI berhasil memulangkan 473 PMI dari Kamboja, dengan total pemulangan dari tiga negara (Kamboja, Myanmar, dan Laos) mencapai 1.235 orang. Namun, proses pemulangan ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kerja sama diplomatik, kurangnya data akurat mengenai keberadaan PMI ilegal, serta hambatan administratif di negara tujuan.

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pencegahan keberangkatan ilegal. Banyak calon PMI menggunakan visa wisata untuk masuk ke negara-negara transit sebelum menuju Kamboja, sehingga aparat imigrasi sulit melakukan penahanan atau pencegahan secara efektif. Selain itu, jalur-jalur ilegal melalui pelabuhan dan bandara tertentu, seperti Pelabuhan Batam Center, menjadi titik rawan yang sulit dikendalikan secara penuh.

Implikasi Sosial dan Ekonomi

Fenomena TKI ilegal ke Kamboja tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan perlindungan, tetapi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak keluarga di Indonesia yang terdampak secara langsung akibat anggota keluarganya menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi dan edukasi mengenai risiko bekerja secara ilegal di luar negeri. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang

prosedur resmi penempatan tenaga kerja migran turut menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh sindikat perekrutan ilegal.

Dari sisi ekonomi, meskipun tawaran gaji tinggi menjadi daya tarik, para TKI ilegal sering kali mengalami kondisi kerja yang buruk dan tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja. Hal ini menyebabkan kerugian tidak hanya bagi para pekerja, tetapi juga bagi negara yang kehilangan potensi penerimaan devisa dari penempatan tenaga kerja resmi.

Upaya dan Rekomendasi Penguatan Perlindungan

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis. Selain melarang keberangkatan ke Kamboja dan negara rawan TPPO lainnya, pemerintah juga memperkuat kerja sama keimigrasian dengan Kamboja, termasuk rencana penempatan atase imigrasi untuk memudahkan koordinasi dan perlindungan terhadap PMI di sana. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan kasus pekerja migran ilegal.

Selain aspek penegakan hukum, perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja secara ilegal dan prosedur resmi penempatan tenaga kerja migran. Program-program penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media, dapat membantu mengurangi angka keberangkatan ilegal. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan di titik-titik keberangkatan rawan, seperti pelabuhan dan bandara, dengan melibatkan aparat imigrasi dan kepolisian secara sinergis. Penggunaan teknologi informasi dan data intelijen juga dapat menjadi alat efektif dalam mendeteksi dan mencegah keberangkatan ilegal.

Peningkatan Signifikan Jumlah TKI Ilegal di Kamboja dan Dampaknya

Data terbaru dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengungkapkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang bekerja di Kamboja telah mencapai sekitar 80.000 orang. Angka ini menunjukkan

lonjakan yang signifikan dan menjadi perhatian serius pemerintah karena Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi dengan Kamboja dalam penempatan tenaga kerja. Mayoritas PMI ilegal tersebut bekerja di sektor-sektor yang dianggap ilegal, seperti operator judi online dan aktivitas penipuan daring (scamming) yang mengincar korban dari berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga berdampak sosial dan kemanusiaan yang serius. Kementerian Luar Negeri RI melaporkan peningkatan tajam kasus WNI bermasalah di Kamboja pada awal tahun 2025, dengan KBRI Phnom Penh menangani 841 kasus dalam dua bulan pertama tahun ini, tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar kasus terkait dengan keterlibatan WNI dalam penipuan daring, yang sering kali berujung pada eksploitasi dan kekerasan fisik maupun psikologis terhadap para pekerja migran.

Kasus kekerasan dan eksploitasi yang viral di media sosial, seperti penyiksaan terhadap seorang TKI asal Sidoarjo yang dipaksa menjadi admin judi online dan mengalami penyiksaan fisik, menunjukkan betapa rentannya posisi TKI ilegal di Kamboja. Kondisi ini diperparah oleh minimnya perlindungan hukum dan akses bantuan yang memadai bagi mereka yang bekerja secara ilegal di sektor-sektor tersebut.

Upaya Pemulangan dan Penanganan Kasus TKI Ilegal

Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya pemulangan PMI ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi di Kamboja. Pada periode 2024 hingga April 2025, sebanyak 473 PMI berhasil dipulangkan dari Kamboja, dengan total pemulangan dari tiga negara (Kamboja, Myanmar, dan Laos) mencapai 1.235 orang. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya yang terjebak dalam situasi berbahaya di luar negeri.

Selain pemulangan, pemerintah juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus-kasus PMI bermasalah. Sepanjang 2024-2025, tercatat 92 pengaduan

dari Kamboja, yang sebagian besar berkaitan dengan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, proses pemulangan dan penanganan kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya data akurat mengenai keberadaan PMI ilegal, hambatan administratif di negara tujuan, dan keterbatasan kerja sama diplomatik.

Tantangan Pengawasan dan Pencegahan Keberangkatan Ilegal

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi fenomena TKI ilegal ke Kamboja adalah sulitnya pengawasan dan pencegahan keberangkatan ilegal. Banyak calon PMI menggunakan visa wisata untuk masuk ke negara-negara transit seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia sebelum akhirnya menuju Kamboja. Kondisi ini menyulitkan aparat imigrasi Indonesia untuk melakukan penahanan atau pencegahan secara efektif karena secara administratif mereka belum melanggar aturan keimigrasian saat meninggalkan Indonesia.

Selain itu, jalur-jalur keberangkatan ilegal melalui pelabuhan dan bandara tertentu, seperti Pelabuhan Batam Center, menjadi titik rawan yang sulit dikendalikan secara penuh oleh aparat. Sindikat perekrutan ilegal juga memanfaatkan celah ini dengan memfasilitasi pembuatan dokumen palsu dan pengurusan visa secara ilegal untuk memperlancar keberangkatan PMI ilegal.

Peran Agen Perekrutan dan Modus Penipuan yang Semakin Kompleks

Modus penipuan yang digunakan oleh agen perekrutan ilegal semakin kompleks dan memanfaatkan berbagai platform digital. Tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan persyaratan mudah disebarakan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti Telegram, Facebook, dan WhatsApp. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai pegawai call center, admin judi online, atau staf restoran dengan penghasilan besar, namun kenyataannya mereka dipaksa bekerja di sektor ilegal dan rentan terhadap eksploitasi.

Beberapa agen perekrutan ilegal bahkan tidak memiliki kantor resmi dan beroperasi secara tersembunyi, sehingga sulit dilacak oleh aparat. Penutupan sementara terhadap tiga agen PMI ilegal oleh pemerintah merupakan langkah awal

untuk memutus jaringan perekrutan ilegal, namun upaya ini harus diikuti dengan tindakan preventif dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penipuan tersebut.

Implikasi Sosial dan Kemanusiaan dari Fenomena TKI Ilegal

Fenomena TKI ilegal ke Kamboja juga membawa dampak sosial dan kemanusiaan yang serius. Banyak keluarga di Indonesia yang kehilangan anggota keluarganya secara tiba-tiba akibat kematian atau penganiayaan di luar negeri. Data Kementerian P2MI menunjukkan peningkatan angka kematian WNI di Kamboja sebesar 75 persen, seiring dengan meningkatnya jumlah PMI ilegal yang terlibat dalam praktik ilegal.

Selain itu, eksploitasi dan kekerasan yang dialami para TKI ilegal menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan sulit untuk dipulihkan. Kurangnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan konsuler membuat para korban sulit mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Hal ini menuntut pemerintah untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan bantuan bagi PMI yang bermasalah di luar negeri.

Rekomendasi Penguatan Perlindungan dan Penanganan

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu mengintensifkan Kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan tenaga kerja migran, termasuk Kamboja, untuk membangun mekanisme perlindungan yang lebih efektif. Penempatan atase imigrasi dan tenaga kerja di Kamboja dapat memperkuat koordinasi dan pemantauan terhadap keberadaan PMI serta mempercepat penanganan kasus-kasus yang muncul.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja secara ilegal dan prosedur resmi penempatan tenaga kerja migran harus ditingkatkan secara masif. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa perlu berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh calon PMI.

Penguatan pengawasan di titik-titik keberangkatan, seperti pelabuhan dan

bandara, dengan dukungan teknologi informasi dan intelijen juga sangat penting untuk mencegah keberangkatan ilegal. Penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat perekrutan ilegal harus terus dilakukan untuk memberikan efek jera.

Kesimpulan

Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berangkat ke Kamboja telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan menyeluruh dari berbagai pihak. Berdasarkan data terbaru, jumlah pekerja migran Indonesia ilegal di Kamboja diperkirakan mencapai sekitar 80.000 orang. Angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan dan menandakan bahwa Kamboja kini menjadi salah satu tujuan utama TKI ilegal, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z yang tertarik dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi di sektor-sektor yang tidak resmi, seperti judi online dan penipuan daring (scamming). Sayangnya, mayoritas dari mereka berangkat tanpa prosedur resmi, sehingga sangat rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Modus penipuan yang digunakan oleh sindikat perekrutan ilegal sangat beragam dan semakin canggih. Para calon pekerja migran sering kali dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar dan persyaratan mudah melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Namun, kenyataannya mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan terlibat dalam aktivitas ilegal yang merugikan, seperti menjadi operator judi online atau pelaku penipuan daring. Penggunaan jalur transit melalui negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia juga menjadi strategi sindikat untuk mengelabui aparat imigrasi Indonesia, sehingga pengawasan dan pencegahan keberangkatan ilegal menjadi sangat sulit dilakukan. Dari sisi hukum, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai sanksi tegas terhadap pelaku perekrutan ilegal dan perdagangan orang, termasuk ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun bagi para perekrut yang memfasilitasi keberangkatan TKI ilegal. Selain itu, kebijakan pembatalan paspor dan pelarangan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi akan bekerja secara ilegal di luar negeri juga telah diberlakukan sebagai upaya pencegahan. Namun, meskipun sanksi hukum

sudah ada, masih banyak TKI ilegal yang nekat berangkat karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang risiko, dan daya tarik gaji tinggi yang ditawarkan oleh sindikat ilegal.

Tantangan perlindungan negara terhadap TKI ilegal ke Kamboja sangat kompleks. Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral resmi dengan Kamboja terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran, sehingga status hukum TKI ilegal menjadi sangat rentan dan sulit mendapatkan perlindungan hukum maupun bantuan dari pemerintah saat mengalami masalah di luar negeri. Sektor pekerjaan yang dimasuki oleh TKI ilegal di Kamboja umumnya ilegal, sehingga pemerintah Kamboja pun sulit memberikan perlindungan resmi. Kondisi ini memperparah kerentanan TKI ilegal terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang bahkan berujung pada peningkatan angka kematian WNI di Kamboja sebesar 75 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Upaya pemulangan TKI ilegal yang menjadi korban TPPO dan eksploitasi juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sepanjang tahun 2024 hingga April 2025, sebanyak 473 PMI berhasil dipulangkan dari Kamboja, dengan total pemulangan dari tiga negara (Kamboja, Myanmar, dan Laos) mencapai 1.235 orang. Namun, proses pemulangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya data akurat, hambatan administratif, dan keterbatasan kerja sama diplomatik. Selain itu, pengawasan keberangkatan ilegal masih menjadi tantangan besar karena banyak calon PMI menggunakan visa wisata dan jalur transit yang sulit dikendalikan secara efektif oleh aparat imigrasi.

Dampak sosial dari fenomena ini juga sangat nyata. Banyak keluarga di Indonesia yang kehilangan anggota keluarganya secara tiba-tiba akibat kematian atau penganiayaan di luar negeri. Eksploitasi dan kekerasan yang dialami para TKI ilegal menimbulkan trauma psikologis mendalam dan sulit dipulihkan. Kurangnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan konsuler membuat para korban sulit mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan bantuan bagi PMI yang bermasalah di luar negeri.

Untuk itu, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan

hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan kerja sama internasional. Pemerintah perlu mengintensifkan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan tenaga kerja migran, termasuk Kamboja, dengan menempatkan atase imigrasi dan tenaga kerja guna memperkuat koordinasi dan pemantauan keberadaan PMI serta mempercepat penanganan kasus. Edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang risiko bekerja secara ilegal dan prosedur resmi penempatan tenaga kerja migran harus terus ditingkatkan, melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Penguatan pengawasan di titik keberangkatan rawan, seperti pelabuhan dan bandara, dengan dukungan teknologi informasi dan intelijen juga sangat penting untuk mencegah keberangkatan ilegal.

Kesimpulannya, fenomena TKI ilegal ke Kamboja merupakan masalah multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait modus penipuan yang semakin canggih dan keterbatasan kerja sama bilateral. Perlindungan terhadap TKI ilegal harus melibatkan pendekatan komprehensif yang mengutamakan keselamatan, hak asasi manusia, dan keadilan bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Saran

Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Kamboja menunjukkan perlunya langkah strategis yang terintegrasi guna mengatasi berbagai permasalahan hukum, sosial, dan perlindungan yang muncul. Oleh karena itu, beberapa saran berikut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerja sama bilateral dengan Kamboja, khususnya dalam bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran. Penandatanganan perjanjian resmi dan penempatan atase imigrasi di Kamboja sangat penting untuk mempermudah koordinasi, pemantauan, dan penanganan kasus TKI ilegal. Kerja sama ini juga dapat mempercepat proses pemulangan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pekerja

migran yang mengalami masalah.

Kedua, pengawasan dan pencegahan keberangkatan ilegal harus ditingkatkan secara signifikan. Penggunaan teknologi informasi dan intelijen perlu dioptimalkan untuk mendeteksi dan mencegah calon TKI menggunakan dokumen palsu atau jalur tidak resmi. Pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara rawan, seperti Batam Center dan Soekarno-Hatta, harus menjadi prioritas.

Ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah-daerah sumber TKI ilegal harus diperluas. Informasi mengenai risiko bekerja secara ilegal dan prosedur resmi penempatan tenaga kerja migran harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk menyebarkan pesan ini secara efektif.

Keempat, penegakan hukum terhadap sindikat perekrutan ilegal harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan menggunakan data intelijen untuk membongkar jaringan sindikat. Penerapan sanksi pidana yang berat dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Terakhir, pemerintah perlu mengembangkan program reintegrasi sosial dan ekonomi bagi TKI ilegal yang dipulangkan. Pendampingan psikososial dan pelatihan keterampilan akan membantu mereka beradaptasi kembali di masyarakat dan mengurangi kemungkinan kembali ke jalur ilegal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fenomena TKI ilegal ke Kamboja dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia semakin optimal

Daftar Pustaka

Kompas.com. (2025, April 15). 80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2025/04/15/154813578/80000-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-ilegal-mayoritas-terlibat-judi>

- Kompas.id. (2025, Juni 9). Generasi Z Terus Tergoda ke Kamboja, Bekerja di Luar Negeri Seperti Destinasi Impian. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/generasi-z-terus-tergoda-ke-kamboja-bekerja-di-luar-negeri-seperti-destinasi-impian>
- BP3MI. (2025, Mei 1). Tetap Nekat Usai Dideportasi, 1 CPMI Ilegal Niat ke Kamboja Diamankan BP3MI Kepri di Pelabuhan Batam. BP2MI.go.id. Diakses dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tetap-nekat-usai-dideportasi-1-cpmi-ilegal-niat-ke-kamboja-diamankan-bp3mi-kepri-di-pelabuhan-batam>
- Antara. (2025, April 15). Jumlah Pekerja Migran Ilegal dari Indonesia di Kamboja Mencapai 80 Ribu Orang. Harianjogja.com. Diakses dari <https://m.harianjogja.com/news/read/2025/04/15/500/1210352/jumlah-pekerja-migran-ilegal-dari-indonesia-di-kamboja-mencapai-80-ribu-orang>
- Bisnis.com. (2025, April 28). RI Pulangkan 1.235 TKI dari Kamboja-Myanmar hingga April 2025. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250428/12/1872682/ri-pulangkan-1235-tki-dari-kamboja-myanmar-hingga-april-2025>
- Hasbyathoillah, A. (2025, Mei 18). Peningkatan Tajam Kasus Warga Negara Indonesia di Kamboja Awal Tahun 2025: Analisis dan Implikasi. Kompasiana.com. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/hasbyathoillah0138/68295476ed64156ffc4adc33/peningkatan-tajam-kasus-warga-negara-indonesia-di-kamboja-awal-tahun-2025-analisis-dan-implikasi>
- Karding, A. K. (2025, April 15). Menteri P2MI: 80 Ribu Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Berstatus Ilegal. Echannel.co.id. Diakses dari <https://echannel.co.id/menteri-p2mi-80-ribu-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-berstatus-ilegal/>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2025, Mei 14). Laporan Penanganan Kasus WNI di Kamboja. Kemlu.go.id.
- Karding, A. K. (2025, April 28). Membanjir Pekerja Migran Ilegal Indonesia ke

Kamboja. Kumparan.com. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/membanjir-pekerja-migran-ilegal-indonesia-ke-kamboja-24xwVZ9mBli>

- Fajriansyah. (2024). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Korban TPPO Pekerja Migran Non-Prosedural di Kamboja. Universitas Sriwijaya. (Studi tentang strategi pemerintah dalam penanganan korban perdagangan orang di Kamboja, dengan fokus pada pekerja migran non-prosedural asal Sumatera Selatan).
- Nur Harsono. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia: Perspektif HAM dan Hukum Internasional. Jakarta: Rajawali Pers. (Pembahasan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk isu perdagangan orang dan eksploitasi).
- Agus Budiman. (2025). Sosiologi Migrasi dan Perlindungan Pekerja Migran. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya Press. (Analisis faktor sosial-ekonomi yang mendorong migrasi ilegal dan dampaknya terhadap perlindungan pekerja migran).
- Hutasoit, Hotlin. (2025). "Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia dalam Operasi Judi Online di Kamboja: Studi Kasus Sekelompok Pekerja Migran Asal Tanjungpinang sebagai Korban." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 2, No. 3, pp. 57-63. DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah> (Penelitian eksploratif mengenai eksploitasi pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam jaringan judi online di Kamboja).
- Nur Harsono. (2025). "Problematika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural yang Bekerja di Luar Negeri." *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, Vol. 4, No. 2, pp. 240-255. (Analisis kendala perlindungan hukum terhadap pekerja migran non-prosedural, termasuk kasus-kasus di Kamboja).
- Ramadhan, Fajriansyah. (2024). "Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Korban TPPO Pekerja Migran Non-Prosedural di Kamboja." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Universitas Sriwijaya. (Kajian strategi pemerintah dalam penanganan korban perdagangan orang di luar negeri).

- Budiman, Agus. (2025). "Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Terlibat Judi Online dan Penipuan: Implikasi Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Sosiologi UM Surabaya*, Vol. 1, No. 1. (Analisis faktor penyebab dan dampak sosial ekonomi dari fenomena pekerja migran ilegal di Kamboja).
- Ar-Rasyid, Muhammad. (2022). "Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja: Tinjauan Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No. 1, pp. 45-60. (Kajian hukum internasional terkait penanganan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara).
- Untirta Law Faculty. (2024). "Kerangka Kerjasama Indonesia dan Kamboja dalam Perlindungan Hukum Korban TPPO." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 2, pp.100-115. (Pembahasan kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja dalam perlindungan korban perdagangan orang).
- Migrant Care. (2025). "Analisis Jaringan Perekrutan Ilegal dan Eksploitasi Pekerja Migran di Asia Tenggara." *Jurnal Migrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3,